

Manfaat dan Konsekuensi Aplikasi *E-Government* Pemerintah Desa di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten

Jemino

Program Magister Ilmu Pemerintahan STPM "APMD" Yogyakarta

E-mail: jeminokemalang@gmail.com

Article History:

Received: 01 Agustus 2023

Revised: 07 Agustus 2023

Accepted: 09 Agustus 2023

Keywords: *Benefits, Consequences, E-Government Applications, Village Government*

Abstract: *After the existence of E-Government regulations in Indonesia, the Village Government was bombarded with various applications that the Village had to run. These applications are from the central, provincial and district governments. With these many applications, there have been various responses from village officials as representatives of the village government. Thus two problems arise. What are the applications in the village administration and how are the benefits of the village administration to these applications. The author uses the method of literature, interviews and documentation for data collection. The descriptive method is used in the presentation of research results with a narrative approach. From the discussion it can be concluded that the most felt benefit from all existing applications is the Siskeudes application. The SGDs application is an application that should be useful for the village but in reality the application is not smooth so the results are also not optimal. While other applications are more of an application for supra-village data. The consequences of this application for the village government are in the form of providing internet access, application operators and computers/laptops. The SGDs and eHDW applications have another consequence in the form of a large additional budget, while the IDM application has another consequence in the form of a lot of filling and involving many parties.*

PENDAHULUAN

Semua Organisasi (swasta, organisasi masyarakat dan organisasi pemerintahan) mutlak menerapkan manajemen yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu dikenal ada ilmu manajemen perusahaan, manajemen kantor, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen pemerintahan dan sebagainya. Dalam manajemen agar lebih maksimal perlu adanya teknologi informasi. Dalam pemerintahan dikenal e-government. Sesuai topik, pembahasan kita fokuskan pada Manajemen pemerintahan dengan ditunjang teknologi informasi modern, khususnya pada pemerintahan desa. Di Indonesia, website adalah cikal bakal adanya teknologi informasi yang biasa kita kenal dengan istilah Electronic Government atau biasa kita sebut dengan E-Government. Tahun 2003 dalam kaitannya dengan E-Government

presiden mengeluarkan INPRES Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government presiden menginstruksikan diantaranya kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Walikota.

E-Government pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi Pasal 28 C Ayat 1 dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam pasal tersebut tertulis bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran”. Dengan terbitnya Inpres pada tahun 2003 tersebut termasuk diinstruksikan kepada Kementrian untuk pelaksanaan pengembangan E-Government yang pada akhirnya sampai ke pemerintah Desa.

Manajemen pemerintahan menurut Rasyid (2000:148) adalah manajemen yang diarahkan supaya didahului dengan kegiatan merumuskan hasil yang ingin dicapai atau dengan istilah lain tujuan apa yang ingin dicapai dengan money, peralatan, tenaga ahli dan tenaga kerja yang selanjutnya dilaksanakan aksinya. Kemudian hasil akan dinilai untuk menentukan apakah tujuan bisa tercapai dengan baik atau sebaliknya alias gagal. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam rangka menghimpun serta menggerakkan orang-orang, mendapatkan dan membelanjakan uang, juga mengadakan, mempergunakan serta memelihara peralatan agar tujuan organisasi bisa dicapai.

Menurut prinsip-prinsip diatas, dalam kaitan ke dalam, manajemen pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk pengembangan kemampuan agar pemerintahan dalam penerapan teknologi informasi tersebut untuk mendukung, serta menciptakan suasana kerja yang menggairakan berprestasi, kemudiandihartapkan kreativitas setiap stakeholder bisa terpacu dan selanjutnya terjamin keberlangsungan inovasi secara kontinu.

Dengan demikian pemerintahan bertanggungjawab membina kemampuan dan disiplin seluruh aparat desa untuk menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan desa dengan teknologi informasi dalam hal; a) Pelayanan yang maksimal (Service) dalam artian bahwa pelayanan yang diberikan akan membuahkan keadilan yang dapat dirasakan dalam masyarakat; b) Pemberdayaan masyarakat desa (empowerment) dengan tujuan akan mendorong kemandirian yang ada di masyarakat; c) Pembangunan desa (development) dengan tujuan akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

Strategi kebijakan manajemen pemerintahan dalam menjamin kesuksesan mencapai misi pemerintahan desa tersebut di antaranya dengan menciptakan aplikasi-aplikasi penunjang kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 95 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik. Setelah adanya peraturan ini Pemerintah Desa diserbu dengan berbagai Aplikasi yang harus dijalankan oleh Desa. Aplikasi tersebut dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan adanya banyak aplikasi tersebut ada berbagai respon dari perangkat desa sebagai representasi dari pemerintah desa.

LANDASAN TEORI

E-Government

Bank Dunia (World Bank) membuat definisi *e-Government* sebagai berikut: “*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government* / *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti WAN, Internet, dan komputasi seluler) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan perangkat pemerintah lainnya).

Definisi sederhana dibuat oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya sebagai berikut: ‘*E-Government* adalah penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintah’. Ada pula definisi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018, *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Manfaat dan Konsekuensi

Pengertian Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsekuensi diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Oleh karenanya kata konsekuensi adalah persesuaian dengan yang dahulu atau sebelumnya.

Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 Dalam pengertian lain, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa atau Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola wilayah tingkat desa

METODE PENELITIAN

Data dalam tulisan ini dikumpulkan dengan dua metode, yaitu metode literature dan wawancara terstruktur. Metode literature yang dimaksud adalah metode pencarian data dari buku dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode wawancara terstruktur yaitu memberi pertanyaan kepada sumber primer dengan pertanyaan yang telah disiapkan dalam daftar pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya data diuraikan dalam tulisan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa di Kecamatan Kemalang memiliki setidaknya Aplikasi e-government berupa Siskeudes, SDGs, EHDW, Matur Dokter, e-DMC, Siks-NG, Siks-DG, Sibejo, el-Simil, Sipades dan Aplikasi Nikah, Sakura atau kalo dulu Smart dan ketika Covid-19 juga ada Silacak dan Jogo Tonggo, sedangkan 2 dua desa objek penelitian memiliki aplikasi SID yang tidak dimiliki Desa Kemalang karena Desa Balerante dan Desa Talun ada kerjasama dengan LSM Combine di Yogyakarta tentang aplikasi SID ini.

1) Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang diciptakan oleh Lembaga negara yang bernama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengembangan aplikasi ini bertujuan meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa di Indonesia. Keunggulan aplikasi ini adalah dibagikan secara gratis. Selain itu, Aplikasi Siskeudes ini juga memiliki sekilan kelebihan lain, misalnya Fitur-fitur yang ada dikembangkan secara baik dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa secara sederhana sehingga mudah digunakan oleh perangkat desa yang berpendidikan tidak terlalu tinggi. Adapun manfaat dari Aplikasi Siskeudes antara lain; **a)** mengakomodasi semua regulasi yang ada, siskeudes memiliki keunggulan antara lain telah mengakomodir seluruh regulasi mengenai keuangan desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT maupun Kementerian Keuangan sampai Peraturan Bupati. Aplikasi ini tidak ada yang berbeda dengan regulasi yang berlaku; **b)** aplikasi lengkap untuk perencanaan, data perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan data Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ada di aplikasi ini. Data ini harus ada biar bisa entri data untuk proses aplikasi selanjutnya; **c)** aplikasi lengkap untuk penganggaran, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semua ada di aplikasi ini secara lengkap.

d) perencanaan draf peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, Form RAB sesuai aturan, dan lampiran APBDes lainnya lengkap; Aplikasi Lengkap untuk penatausahaan. Kebutuhan administrasi penatausahaan yang diperintahkan undang-undang ada lengkap juga di aplikasi ini. DPA, DPAL, RAK, RAK, SPP, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu semua ada dalam aplikasi ini dan siap dicetak untuk administrasi. Bendahara tidak usah menghitung uang dalam aplikasi ini karena sistem akan menghitung secara otomatis sesuai prosedur dan urutan. Bendahara cukup mencocokkan dengan kenyataan yang ada; **e)** aplikasi lengkap untuk pelaporan, laporan yang diperintahkan Permendagri yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semesteran sudah ada juga tanpa menghitung. Bendahara cukup cetak dari aplikasi; **f)** aplikasi lengkap untuk Pertanggungjawaban; **g)** laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir tahun yang diperintahkan undang-undang untuk lampiran laporan keuangan juga tidak masalah karena laporan juga cukup cetak dari aplik

2) Aplikasi SIKS-NG

SIKS-NG merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. SIKS-NG merupakan satu aplikasi pembaruan data yang dapat merubah dan mengusulkan warga ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun kepesertaan Program Bansos. Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah. Aplikasi ini memuat orang yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam Kegiatan pengisian data harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan agar penyaluran program bantuan dari Kementrian Sosial tepat sasaran. Data adalah hal yang penting dan menjadi inspirasi untuk apapun yang direncanakan. Kita sering kurang memperhatikan data dan tidak menghargai data, akibatnya data kemiskinan antar instansi pasti berbeda dan membuat data sendiri-sendiri manfaat yang bisa diambil dari aplikasi SIKS-NG yaitu; mengetahui seseorang masuk DTKS, SIKS-NG memiliki keunggulan antara lain dapat memberi data seseorang masuk DTKS atau tidak bisa dilakukan pengecekan sepanjang ada sinyal internet.

a) Mengusulkan warga masuk DTKS, data DTKS dapat ditambah dengan pengusulan. Hal

seperti ini bisa dilakukan ketika up-date data. Walaupun begitu keputusan terakhir tetap di kementerian social untuk menerima atau menolaknya.

- b) Verifikasi Usulan Pribadi masuk DTKS, ada jalur lewat aplikasi seseorang mengusulkan dirinya masuk DTKS ke Kementerian Sosial. Usulan tersebut oleh kementerian sosial akan dimintakan ke Aplikasi SIK-NG dilakukan verifikasi layak tidaknya masuk DTKS. Aplikasi SIKS-NG ini ada beberapa yang harus dipenuhi agar bisa berjalan dengan lancar yaitu; *Pertama*, Operator Sistem, semua aplikasi membutuhkan operator. Demikian juga aplikasi SIKS-NG membutuhkan operator yang memumpuni. *Kedua*, Sambungan internet, aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi yang terkoneksi dengan Pemerintah Kabupaten (Dinas Sosial) dan Pemerintah pusat (Kemensos). Sebagaimana aplikasi yang lain Data tidak ada di Desa tetapi di Pemerintah pusat karena server ada di sana.

3) SDGs Kementerian Desa

Perlu diketahui bahwa SDGS adalah kepanjangan istilah internasional *Sustainable Development Goals* yang kalau diartikan bebas kurang lebih artinya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut teorinya SDGS diarahkan pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan hingga generasi selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pembangunan desa dalam penyediaan informasi yang akurat tentang warga desa maka muncul ide membuat aplikasi ini.

Aplikasi SDGS Desa bertujuan membantu dalam mengumpulkan big data tersebut. diharapkan mempermudah dalam tahapan pembangunan yang ada di desa. Akan tetapi perlu dipahami bagi semua aparatur desa, bahwa aplikasi SDGS akan dijadikan rambu atau kode agar diusakan membangun desa yang akan menjadi tanggung jawabnya bisa sampai generasi selanjutnya.

Pada intinya Aplikasi SDGS bukan ditujukan untuk konsep bersama dengan desa agar bisa mengarahkan dengan panduan yang lebih baik. Aplikasi SDGS diproyeksikan sebagai sebuah barometer agar bisa mendeteksi setiap warga desa, jika ada yang tertinggal dalam pembangunan desa yang sedang berjalan saat ini. Sebagai ilustrasi adalah adanya kelompok masyarakat yang sering dilupakan seperti kaum difabel, fakir miskin, panti jompo, dan semacamnya. Dengan aplikasi ini diharapkan kelompok masyarakat tersebut itu tidak tertinggal, karena hal itu tidak sesuai dengan slogan yang ada di SDGS Desa yaitu *no one left behind*. Konsekuensi yang harus ditanggung Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program ini, yaitu:

- a) Biaya yang besar, sejak Tahun 2021 Pemerintah Desa diwajibkan oleh pendamping desa untuk menganggarkan pendataan sampai tahun 2023 ini. Pada tahun 2023 ini Desa Balerante menganggarkan 3 juta, Desa Talun 4 juta dan Desa Kemalang 11 juta rupiah. Pada tahun 2021 semua desa menganggarkan sekitar 40 juta untuk program pendataan SDGs ini. Pada tahun 2022 Desa menganggarkan sekitar 8 juta. Biaya ini tidak berbandinglurus dengan hasil yang didapatkan.
- b) Operator dan Jaringan internet, aplikasi ini rumit dan data yang dientri sangat banyak sehingga membutuhkan enumerator yang banyak. Ada sekitar 20 enumerator yang harus dikerahkan untuk entri data.
- c) Pendataan yang banyak sekali, tiap enumerator akan mendata banyak sekali. Mulai dari pendataan Desa, pendataan Rukun Tetangga (RT), Pendataan Keluarga dan Pendataan semua warga.

4) Aplikasi IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks gabungan yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan, Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun disusun dengan maksud untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.

Klasifikasi terhadap status desa tersebut apakah Desa dalam kategori Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju ataukah Desa Mandiri. Sedangkan manfaat dari aplikasi IDM yaitu:

- a) Mengetahui Kemajuan Pembangunan Desa, aplikasi IDM memiliki Output berupa angka yang akan diketahui tingkat kemajuan dari nilai tersebut. Misalnya tahun sebelumnya 0,7002 kemudian tahun berikutnya 0,7090 berarti ada perkembangan dan naik dari status desa berkembang menjadi desa maju. Hal itu dapat diketahui dari kriteria Status Desa yang ditetapkan kementerian Desa dengan ambang batas yaitu Desa Sangat Tertinggal $IDM \leq 0,4907$, Desa Tertinggal $0,4907 < IDM \leq 0,5989$, Desa Berkembang $0,5989 < IDM \leq 0,7072$ Desa Maju $0,7072 < IDM \leq 0,8155$ dan Desa Mandiri $IDM > 0,8155$.
- b) Salah satu dasar penentuan besaran Dana Desa Tahun Berikutnya, selain itu status desa dalam IDM digunakan Kementerian Keuangan untuk menentukan jumlah alokasi dana desa setiap tahunnya. Konsekuensi yang harus ditanggung desa dengan adanya aplikasi IDM yaitu; *Pertama*, Operator Sistem, aplikasi IDM membutuhkan operator untuk input data. Sebaik apapun aplikasi jika tidak ada operator maka tidak ada faedahnya. Aplikasi IDM membutuhkan operator yang untuk Desa Balerante oleh Bapak Jainu dan Desa Talun operator adalah Sekretaris Desa, sedangkan untuk Desa Kemalang operator Siskuedes adalah mantan Kasi Pemerintahan, *Kedua*, Jaringan internet, aplikasi IDM merupakan aplikasi yang terkoneksi dengan Kecamatan (admin kecamatan), Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah pusat (Kemendes). Data tidak ada di Desa tetapi di Pemerintah pusat. Entri data dan melihat data harus dengan sambungan internet sehingga Pemerintah Desa harus siap dengan internet karena data yang diisikan sangat banyak, *Ketiga*, Melibatkan banyak narasumber dan data yang diisikan sangat banyak. Data yang diisikan untuk dalam aplikasi ini sebanyak 1.112 poin yang jika dihitung juga perincian 1600 pertanyaan. Perlu banyak narasumber untuk bisa mengisi data tersebut agar lebih valid.

5) Aplikasi SIKS-DJ

Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan berbagai layanan penyelenggaraan sosial di Jawa Tengah secara cepat, tepat, mudah, murah, efektif dan efisien dengan dukungan data yang valid dan mutakhir. Secara garis besar, berdasarkan informasi dari operator manfaat dari aplikasi SIKS-DJ yaitu:

- a. Mengetahui seseorang masuk Data Penerima Bantuan Prov Jateng, SIKS-DJ memiliki keunggulan antara lain telah memberi data seseorang masuk golongan bisa menerima pemihakan provinsi Jawa Tengah atau tidak bisa dilakukan pengecekan sepanjang ada sinyal internet.
- b. Mengusulkan warga masuk Penerima Bantuan Provinsi, Data Penerima Bantuan dapat ditambah dengan pengusulan. Hal seperti ini bisa dilakukan ketika up-date data. Walaupun begitu keputusan terakhir tetap di Dinas Sosial Provinsi untuk menerima atau menolaknya.

Dari informasi operator Aplikasi SIKS-DJ ini diketahui juga ada beberapa yang harus dipenuhi agar bisa berjalan dengan lancar sehingga konsekuensi yang ada yaitu; *Pertama*, Operator Sistem, semua aplikasi membutuhkan operator. Demikian juga aplikasi SIKS-DJ membutuhkan operator yang handal. *Kedua*, Sambungan internet, aplikasi SIK-NJ

merupakan aplikasi yang terkoneksi dengan Pemerintah Provinsi (Dinas Sosial). Sebagaimana aplikasi yang lain Data tidak ada di Desa tetapi di Pemerintah provinsi karena server ada di sana.

6) Aplikasi SIPADES

Sipades merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa atau mudahnya asset Desa guna pengadministrasian dan inventarisasi aset Desa sebagaimana amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kaur Umum & TU. Adapun manfaat aplikasi seharusnya antara lain:

- a. Mendata asset desa secara online dengan panduan system sehingga cara data apa yang perlu didata sudah ada panduan dalam sistem.
- b. Data lebih mendekati kebenaran karena jika menulis kode dan lainnya tidak tepat, system akan memberi tahu.

Walaupun secara teori ada manfaatnya, tetapi karena kerumitan aplikasi dan sering tidak bisa diakses, tiga pemerintah desa penelitian belum bisa menikmati manfaat yang disediakan oleh system aplikasi.

Aplikasi Sipades ini ada beberapa yang harus dipenuhi agar bisa berjalan dengan lancar. Konsekuensi yang ada yaitu :

- 1) Sistem Operasi minimal Windows 7 (windows 10 lebih baik).
- 2) Memory/RAM minimal 4 GB DDR3
- 3) Layar/Monitor minimal 13.3 inci
- 4) Konektivitas WiFi
- 5) Aplikasi browser Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.

7) Aplikasi Stunting

Ada dua pendataan stunting dengan aplikasi. Aplikasi dari BKKBN dan pendataan dengan aplikasi eHDW dari Kemendes. Walaupun data yang diisikan hampir sama, tapi hasil ada yang berbeda. Adapun manfaat dari aplikasi ini diantaranya yaitu:

- a) Mempermudah KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan penerimaan rumah tangga 1.000 HPK.
- b) Menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi masyarakat
- c) Mempermudah masyarakat dan Pemerintah Desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan stunting di Desa.
- d) Memudahkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memantau kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting 1.000 HPK di tingkat Desa secara riil dan *ter-update*.
- e) Mempermudah Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan kebijakan tentang program/kegiatan pencegahan stunting dengan berbasis data riil dan *ter-update*.

Aplikasi Stunting ini ada beberapa yang harus dipenuhi agar bisa berjalan dengan lancar. Konsekuensi yang ada yaitu

- a) Menyiapkan Handphone (HP). Aplikasi ini berbasis HP Android sehingga desa menganggarkan pembelian HP untuk fasilitas aplikasi ini.
- b) Anggaran operator. Aplikasi ini harus ada operator yang oleh Pendamping desa diharuskan dianggarkan di APBDes.
- c) Aplikasi ini juga mengharuskan jaringan internet sehingga perlu wifi atau data internet untuk bisa bekerja.

KESIMPULAN

Dari Pembahasan disimpulkan bahwa :

- 1) Aplikasi yang masuk ke tiga desa objek penelitian ada yang berjalan lancar dan ada yang tidak lancar. Aplikasi Siskeudes lancar terbukti bisa mencetak semua dokumen penatausahaan dan laporan dengan lancar, IDM terunggah sesuai jadwal, e-HDW dan e-Simil bisa mendata Stunting dengan lancar, SIKS-NG dan SIKS-DJ bisa memberi data rawan sosial walau tidak valid tapi bukan karena aplikasi dan SIPD juga cukup lancar. Aplikasi SDGs belum bisa maksimal karena aplikasi yang sering trouble dan Sipades tidak lancar dan belum selesai sampai saat ini karena sering tidak buka dibuka dan kerumitan sistem.
- 2) Manfaat yang paling dirasakan dari seluruh aplikasi yang ada yaitu aplikasi Siskeudes. Aplikasi SGDS aplikasi yang seharusnya bermanfaat bagi desa tetapi dalam kenyataannya aplikasi tidak lancar sehingga hasil juga tidak maksimal. Sementara aplikasi lain lebih bersifat aplikasi untuk data supradesa. Konsekuensi aplikasi ini bagi pemerintah desa berupa penyediaan akses internet, operator aplikasi dan komputer/laptop. Aplikasi SGDs dan eHDW ada konsekuensi lain berupa tambahan anggaran yang cukup banyak, sedangkan Aplikasi IDM memiliki konsekuensi lain berupa pengisian yang banyak dan melibatkan banyak pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Handoko Hani. 2017. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press.
- <https://money.kompas.com/read/2022/07/12/140407226/sri-mulyani-keluhkan-24000-aplikasi-pemerintah-bikin-boros-anggaran-menkom>
- <https://fisipol.uma.ac.id/pentingnya-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>
- <https://plus.kapanlagi.com/arti-konsekuensi-pengertian-perbedaan-dengan-hukum-dan-kata-kata-bijak-6ef6af.html>
- <https://kanaldesa.com/artikel/mengenal-idm-sang-penentu-jumlah-anggaran-dana-desa>
- <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/asistensi-aplikasi-siks-ng-bagi-operator-dtks-se-kecamatan-wuluhan>
- <https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/1704-Apa-Itu-eHDW>
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/aplikasi-siskeudes-kawal-dana-desa>
- <https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/>
- Indrajit Ek..2016. *Electronic Government*. Yogyakarta:Preinexus
- Pemerintah Kabupaten Klaten. 2015. *Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten*. Klaten:PDE.
- Purwanto, E. A. 2007. *Mengkaji Potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Rudy. 2022. *Bahan Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Lampung: Aura.
- Ryas Rosyid. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Ardila
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, T. W. W. (11 April 2012). *Penguatan Etika & Integritas Birokrasi dalam Rangka Pencegahan Korupsi*. Disampaikan dalam Seminar KKT Pra Stusi Lapangan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIII, 2012 di Jakarta